Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Fragmentasi Seljuk Syam setelah Wafatnya Tutush: Konflik Ridwan dan Duqaq serta Menguatnya Kekuasaan Para Atabeg (1095-1104 M)

Kesyia Habibah Artagulin
UIN Sunan Ampel Surabaya
artagulinkesyia09@gmail.com

Achmad Zuhdi Dh
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Fragmentasi kekuasaan Seljuk Syam setelah wafatnya Tutush pada 1095 M memunculkan persaingan politik antara Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus serta mendorong menguatnya kekuasaan para atabeg. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi politik Seljuk Syam pada masa Tutush, menganalisis dinamika konflik Ridwan–Duqaq dan menguatnya kekuasaan para atabeg pada 1095–1104 M, serta menjelaskan dampaknya terhadap stabilitas politik dan pergeseran elite di Syam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan sirkulasi elite Vilfredo Pareto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik Seljuk Syam pada masa Tutush ditandai oleh persaingan perebutan kekuasaan dan upaya memperluas wilayah, yang kemudian memicu fragmentasi setelah wafatnya Tutush pada 1095 M. Dinamika konflik Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus pada 1095–1104 M memperlihatkan kegagalan konsolidasi kekuasaan, sekaligus mendorong menguatnya peran Janah al-Dawla di Homs dan Tughtekin di Damaskus. Dampaknya, fragmentasi tersebut melemahkan koordinasi politik dan pertahanan antarpenguasa Muslim di Syam serta mendorong pergeseran otoritas dari keluarga dinasti kepada elite militer dan munculnya kekuatan regional baru.

Kata Kunci: *Atabeg, Duqaq, Fragmentasi kekuasaan, Seljuk Syam, Ridwan.*

PENDAHULUAN

Dinasti Seljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Malikshah bin Alp Arslan (w. 485 H/1092 M). Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Seljuk membentang dari Kashgor (ujung Turkistan atau Asia Tengah) hingga Yerusalem, dengan stabilitas politik yang ditopang oleh sistem administrasi yang efektif (Manan, 2018: 15). Namun, begitu Malikshah wafat di Baghdad pada Syawal 485 H/November

1092 M, konflik suksesi langsung pecah di antara para keturunan dan kerabat Seljuk. Terken Khatun mengangkat putranya, Mahmud, sebagai sultan di Isfahan, sedangkan kelompok Nizamiyah mengangkat Barkiyaruq di Rayy (Bosworth, 1988). Setelah Mahmud wafat, Barkiyaruq berkuasa sebagai sultan. Kekuasaannya kemudian ditentang oleh Tutush, penguasa Seljuk Syam, yang menuntut kesultanan, tetapi ia tewas dalam pertempuran melawan Barkiyaruq di dekat Rayy pada 488 H/1095 M. Wafatnya Tutush membuat wilayahnya terbagi antara kedua putranya, Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus, sehingga konflik suksesi di pusat kesultanan merembet ke Syam (Gök, 2016: 246).

Pembagian ini tidak menghasilkan stabilitas, melainkan memunculkan rivalitas terbuka antara kedua bersaudara. Pada 1095 M, Ridwan mengepung Damaskus, tetapi gagal merebutnya. Dalam persaingan itu, para atabeg, yang semula berperan sebagai pengasuh dan penasihat militer pangeran muda, secara bertahap menjadi pemegang kekuasaan riil. Ṭughtekin mengendalikan militer dan pemerintahan Damaskus atas nama Duqaq, sedangkan Janaḥ al-Dawla, atabeg Ridwan, berselisih dengan tuannya pada 1097 M lalu menguasai Homs. Kedatangan Pasukan Salib pada 1097–1099 M semakin memperumit keadaan, karena perpecahan internal menghambat terbentuknya respons politik dan militer yang terpadu. Setelah Janaḥ al-Dawla terbunuh pada 1102 M, Duqaq merebut Homs, tetapi ia sendiri jatuh sakit dan wafat pada Juni 1104 M. Menjelang wafatnya, Duqaq mengangkat Ṭughtekin sebagai atabeg bagi putranya yang masih kecil, Tutush II (Wilson, 2023: 121-125 dan 164). Penunjukan ini justru memperkuat posisi Ṭughtekin, yang kemudian menyingkirkan keturunan Duqaq sehingga kekuasaan riil di Damaskus berpindah dari keluarga dinasti kepada sang atabeg.

Topik ini penting untuk dikaji karena dua alasan utama. Pertama, kajian tentang Seljuk Syam umumnya masih berfokus pada hubungannya dengan Perang Salib dan keberhasilan Pasukan Salib, sementara analisis mengenai dinamika internal pasca-Tutush, khususnya konflik politik Ridwan–Duqaq dan peran para atabeg di Damaskus, Aleppo, dan Homs, masih terbatas. Kedua, kajian ini penting karena menunjukkan bagaimana lemahnya institusi suksesi, tingginya ketergantungan pada elite militer, dan rivalitas dinasti dapat memicu disintegrasi politik yang membentuk lanskap kekuasaan regional di Syam pada awal abad ke-12 M.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini antara lain artikel İbrahim Duman berjudul "Dımaşk Selçuklu Meliki Ertaş b. Tutuş" dalam *Türkiyat Mecmuası* Vol.

26 No. 1 (2016). Kajian tersebut membahas Irtash, salah satu putra Tutush, yang disingkirkan ke Baalbek pada masa Duqaq, sempat menjadi penguasa Damaskus setelah 1104 M, lalu berselisih dengan atabeg Ṭughtekin (Duman, 2016). Fokusnya adalah biografi seorang pangeran Seljuk Syam, bukan fragmentasi kekuasaan secara keseluruhan. Selain itu, disertasi berjudul *The Emirate of Damascus in the Early Crusading Period, 488–549/1095–1154* di University of St Andrews menelaah berdirinya Emirat Damaskus setelah kematian Tutush, peran Ṭughtekin sebagai penguasa de facto, kebijakan luar negeri, dan pengaruh kedatangan Pasukan Salib (al-Zanki, 1990). Kajian-kajian tersebut berpusat pada Damaskus atau pada tokoh tertentu, serta belum menganalisis konflik Ridwan–Duqaq dan menguatnya para atabeg di Damaskus, Aleppo, dan Homs sebagai satu proses fragmentasi, apalagi dengan kerangka teori konflik dan sirkulasi elite. Berbeda dengan itu, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap konflik Ridwan–Duqaq dan menguatnya para atabeg sebagai proses konflik kepentingan atas otoritas sekaligus pergeseran elite penguasa dari keluarga dinasti kepada elite militer, dengan menempatkan konflik suksesi pasca-Malikshah sebagai titik awal kerapuhan struktur suksesi Seljuk.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi politik Seljuk Syam yang melatarbelakangi fragmentasi kekuasaan pasca-Tutush, menelusuri dinamika konflik Ridwan–Duqaq serta menguatnya kekuasaan para atabeg, dan menganalisis dampaknya terhadap stabilitas politik dan kekuatan regional di Syam. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa fragmentasi Seljuk Syam tidak semata-mata disebabkan oleh wafatnya Tutush, tetapi merupakan hasil dari lemahnya sistem suksesi warisan era Malikshah, konflik kepentingan antar-pewaris yang memperebutkan otoritas, serta bergesernya kekuasaan dari keluarga dinasti kepada para atabeg yang mengendalikan kekuatan militer dan administrasi kota. Kondisi tersebut juga membuka ruang bagi menguatnya aktor-aktor regional, baik penguasa lokal, Fatimiyah, maupun Pasukan Salib.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah dengan pendekatan politik-historis, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 2011: 100-101). Sumber primer meliputi *Dhayl Tarikh Dimashq* karya Ibn al-Qalanisi, *al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn al-Athir, dan *Zubdat al-Ḥalab min Tarikh Ḥalab* karya Ibn al-Adim. Sumber sekunder meliputi jurnal, disertasi, dan skripsi mengenai sejarah politik Seljuk Syam. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menjelaskan konflik otoritas antara

Ridwan dan Duqaq serta antara para atabeg (Dahrendorf, 1957: 163-65), serta teori sirkulasi elite Vilfredo Pareto untuk memahami pergeseran kekuasaan dari elite dinasti kepada elite militer yang dominan (Pareto, 1968: 50).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Seljuk Syam Masa Tutush yang Melatarbelakangi Fragmentasi Kekuasaan

Taj al-Dawlah Tutush memperoleh kedudukan politik di Syam melalui pembagian wilayah kekuasaan dalam keluarga Seljuk pada masa pemerintahan saudaranya, Sultan Malik Syah. Menurut Ibn al-Qalanisi, pada 470 H/1077–1078 M, Tutush datang ke Syam dan memperoleh dukungan dari sejumlah kelompok Arab Bani Kilab. Kedatangannya berlangsung ketika persaingan untuk menguasai kota-kota di Syam masih berlangsung, terutama di Aleppo dan Damaskus (Ibn al-Qalanisi, 1908: 112). Keterangan ini sejalan dengan penjelasan Bosworth bahwa pembagian wilayah kepada anggota keluarga penguasa merupakan salah satu mekanisme politik dalam pemerintahan Seljuk. Melalui pembagian tersebut, para pangeran memperoleh basis kekuasaan sendiri, tetapi tetap berada dalam lingkungan politik yang berpusat pada sultan (Bosworth, 1968: 102). Hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan Tutush di Syam sejak awal bertumpu pada dua sumber kekuatan, yakni pemberian wilayah oleh Malik Syah dan kemampuan militernya untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaan tersebut.

Penguasaan Damaskus memperlihatkan bagaimana penugasan oleh sultan dan kebutuhan militer dapat menjadi jalan bagi perubahan kekuasaan. Ibn al-Qalanisi mencatat bahwa pada 471 H/1078–1079 M, pasukan Fatimiyah di bawah pimpinan Nasr al-Dawlah al-Juyushi mengepung Damaskus dan mempersempit ruang gerak penguasanya, Atsiz. Dalam keadaan terdesak, Atsiz mengirim utusan kepada Tutush untuk meminta bantuan dan menjanjikan penyerahan kota kepadanya. Tutush kemudian bergerak menuju Damaskus. Setelah mengetahui kedatangannya, pasukan Mesir meninggalkan pengepungan dan bergerak menuju kawasan pesisir. Atsiz menyambut Tutush di Adzra, menyatakan ketaatan, dan menyerahkan kota tersebut kepadanya. Akan tetapi, hubungan keduanya tidak bertahan lama. Tutush mencurigai Atsiz, menangkapnya pada bulan Rabiul awal, membunuh saudaranya terlebih dahulu, lalu memerintahkan agar Atsiz dicekik dengan tali busur (Ibn al-Qalanisi, 1908: 112).

Riwayat Ibn al-Athir juga menempatkan penyingkiran Atsiz sebagai bagian penting dari proses penguasaan Damaskus oleh Tutush. Atsiz yang sebelumnya menguasai kota itu meminta bantuan kepada Tutush ketika menghadapi ancaman pasukan Mesir. Namun, setelah pengepungan berhasil diatasi, Tutush mengambil alih kekuasaan dan menyingkirkan penguasa yang telah meminta pertolongannya (Al-Athīr t.t. jil. 8: 318-19). Rincian mengenai alasan pembunuhan Atsiz dalam berbagai riwayat tidak sepenuhnya sama, kedua sumber tersebut memperlihatkan bahwa bantuan militer tidak sekadar menghasilkan pemulihan kekuasaan penguasa setempat. Bantuan itu justru membuka kesempatan bagi Tutush untuk menggantikannya. Penguasaan Damaskus, dengan demikian, menunjukkan bahwa kedudukan politik seorang penguasa lokal dapat berubah ketika ia bergantung pada kekuatan militer pihak lain yang memiliki kepentingan tersendiri.

Setelah menguasai Damaskus, Tutush berusaha memperluas pengaruhnya di Syam, tetapi menghadapi persaingan dari penguasa-penguasa lain. Ibn al-Qalanisi mencatat bahwa pada 470 H/1077–1078 M dan 471 H/1078–1079 M, Tutush bergerak menuju Aleppo dan berusaha menguasainya, tetapi belum berhasil mencapai tujuannya. Sementara itu, pada 472 H/1079–1080 M, Syaraf al-Dawlah Muslim bin Quraisy menerima penyerahan kota tersebut. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penguasaan Damaskus tidak serta-merta memberikan Tutush kendali atas seluruh Syam. Aleppo tetap menjadi pusat persaingan yang melibatkan penguasa lokal, kelompok Arab, dan para pemimpin Seljuk (Ibn al-Qalanisi, 1908: 113).

Persaingan tersebut berlanjut hingga pertengahan dekade 1080-an. Menurut Ibn al-Qalanisi, pada 475–476 H/1082–1084 M, Muslim bin Quraisy menghimpun dukungan dari sejumlah kelompok Arab dan Kurdi serta mempersiapkan serangan terhadap Damaskus. Tutush yang ketika itu berada di luar kota akhirnya kembali untuk menghadapi ancaman tersebut. Persaingan semakin tajam pada 478–479 H/1085–1086 M, ketika Sultan Sulaiman bin Qutulmish, penguasa Seljuk Rum berhadapan dengan Muslim bin Quraisy. Ibn al-Qalanisi menyebutkan bahwa pertempuran antara keduanya berlangsung di dekat Sungai Safin pada 478 H, sedangkan pada 479 H Tutush mengalahkan pasukan Sulaiman di Ain Salm, pada 18 Safar. Sulaiman terbunuh dalam kekalahan tersebut, sementara Tutush memperoleh kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Aleppo (Ibn al-Qalanisi, 1908: 114-19). Peristiwa ini menunjukkan

bahwa perubahan penguasaan kota-kota di Syam tidak hanya ditentukan oleh keputusan sultan, tetapi juga oleh hasil persaingan militer antarpenguasa regional.

Meskipun memperoleh kemenangan atas Sulaiman bin Qutulmish, Tutush tidak dapat mempertahankan Aleppo sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Ibn al-Qalanisi menerangkan bahwa Sultan Malik Syah kemudian datang ke Syam dan mengambil alih Aleppo. Sultan selanjutnya mengangkat Qasim al-Dawlah Aq Sunqur sebagai gubernur kota tersebut pada 480 H/1087–1088 M (Ibn al-Qalanisi, 1908: 419). Peristiwa ini memperlihatkan batas kekuasaan Tutush dalam struktur politik Seljuk. Ia memang memiliki basis kekuasaan di Damaskus dan mampu melakukan ekspansi militer, tetapi penentuan penguasa kota strategis tetap berada dalam jangkauan otoritas Malik Syah.

Keseimbangan tersebut berubah setelah Malik Syah meninggal pada 485 H/1092 M. Ibn al-Athir mencatat bahwa Tutush memanfaatkan kematian saudaranya untuk mengajukan klaim atas kesultanan Seljuk. Ia bergerak untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah timur dan berhadapan dengan para pemimpin yang sebelumnya berada dalam lingkungan politik Seljuk. Namun, Aq Sunqur di Aleppo dan Buzan di Edessa serta Harran kemudian mendukung Barkiyaruq, putra Malik Syah, sehingga langkah Tutush menghadapi perlawanan dari kekuatan regional yang sebelumnya memiliki hubungan dengan pemerintahan Seljuk (Al-Athīr, 1987, jil. 8: 483-85). Perubahan sikap tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara sultan, anggota keluarga dinasti, dan para gubernur tidak selalu didasarkan pada kesetiaan yang permanen. Ketika pusat kekuasaan kehilangan penguasanya, para pemegang wilayah dapat menentukan pilihan politik berdasarkan kepentingan dan perhitungan kekuatan masing-masing.

Konflik suksesi itu berakhir dengan kekalahan dan kematian Tutush dalam pertempuran melawan Barkiyaruq di dekat Rayy pada 488 H/1095 M. Ibn al-Athir mencatat bahwa pertarungan tersebut merupakan bagian dari perebutan kedudukan tertinggi dalam pemerintahan Seljuk setelah wafatnya Malik Syah (Al-Athīr t.t. jil. 8: 502). Kematian Tutush kemudian diikuti oleh pembagian wilayah kekuasaannya di Syam di antara kedua putranya: Ridwan menguasai Aleppo, sedangkan Duqaq menguasai Damaskus. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pola pembagian wilayah yang sebelumnya memberikan basis kekuasaan kepada Tutush juga berlanjut pada generasi berikutnya. Akan tetapi, ketika otoritas pusat melemah, pembagian tersebut berpotensi memperbesar persaingan antarpenguasa regional. Oleh karena itu, pengalaman Tutush memperlihatkan dua sisi dari sistem politik Seljuk dimana pembagian wilayah dapat

memperluas jangkauan kekuasaan dinasti, tetapi juga menyediakan basis militer dan politik bagi munculnya persaingan ketika kesatuan dinasti tidak lagi dapat dipertahankan.

Dinamika Konflik Ridwan–Duqaq serta Menguatnya kekuasaan Para atabeg (1095-1104 M)

Wafatnya Tutush pada 488 H/1095 M membuka persaingan politik yang menentukan perkembangan kekuasaan Seljuk di Syam. Menurut Ibn al-Qalanisi dalam *Dhayl Tarikh Dimashq*, setelah Tutush terbunuh dalam pertempuran melawan Barkiyaruq pada 17 Safar 488 H/1095 M. Ridwan yang menerima kabar kematian ayahnya ketika berada di kawasan ʿAna, di tepi Sungai Eufrat. Ia segera menuju Aleppo dan memperoleh akses ke kota melalui bantuan wazir Abu al-Qasim. Namun, penguasaan Aleppo tidak serta-merta menjamin bahwa Ridwan telah mengendalikan seluruh kekuatan militer yang berada di dalamnya (Ibn al-Qalanisi, 1908: 129). Ibn al-Athir memberikan keterangan mengenai peran Janah al-Dawla dalam menggalang dukungan pasukan Maghribi di benteng Aleppo dan menghadapi pejabat yang ditinggalkan Tutush untuk menjaga kota. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pergantian penguasa berlangsung bersamaan dengan persaingan di antara para pemegang kekuatan militer. Ridwan memang memperoleh kedudukan sebagai penguasa Aleppo, tetapi keberlangsungan pemerintahannya tetap bergantung pada kemampuan menjalin hubungan dengan para amir yang menguasai pasukan dan memiliki pengaruh di lingkungan istana (Al-Athīr, 1987, jil 8: 513). Dalam kerangka Dahrendorf, otoritas Ridwan atas Aleppo bersifat formal dan belum penuh, sehingga sejak awal terbuka ruang konflik antara pemegang kedudukan formal dan para amir yang menguasai kekuatan militer (Dahrendorf, 1957: 165-67).

Sebelum Tutush wafat, pembagian tugas di antara para pengasuh militer kedua putranya telah membentuk hubungan politik yang berbeda. Ibn al-Adim menjelaskan bahwa Janah al-Dawla ditempatkan sebagai atabeg Ridwan, sedangkan Duqaq berada dalam pengasuhan Tughtekin (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 120). Ibn al-Qalanisi juga menerangkan bahwa Tughtekin pernah dipercaya Tutush untuk mengurus Mayyafariqin dan mendampingi Duqaq. Kedua tokoh tersebut dengan demikian bukan sekadar pejabat yang muncul setelah kematian Tutush, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang telah dibangun sebelumnya. Akan tetapi, ketika Tutush meninggal, kedudukan mereka berubah secara mendasar. Mereka tidak lagi hanya menjalankan tanggung jawab atas

nama seorang penguasa yang masih hidup, tetapi turut menentukan siapa yang dapat menguasai wilayah, memperoleh dukungan pasukan, dan mempertahankan pemerintahan. Perbedaan kedudukan inilah yang kemudian memengaruhi cara Janah al-Dawla dan Tughtekin mengembangkan kekuasaan masing-masing (Ibn al-Qalanisi, 1908: 133-34). Secara teoretis, para atabeg semula berada pada posisi subordinat dalam struktur otoritas dinasti, dengan kepentingan yang masih laten. Wafatnya Tutush melemahkan pengikat otoritas itu sehingga kepentingan mereka mulai menjadi manifes. Dari sudut Pareto, mereka adalah elite militer yang sudah berada di lingkaran kekuasaan dan siap memasuki posisi elite yang memerintah (Pareto, 1968: 59-60).

Pemisahan Aleppo dan Damaskus terjadi ketika Sawutakin al-Khadim, wakil Tutush di Damaskus, secara diam-diam mengundang Duqaq untuk datang ke kota tersebut. Menurut Ibn al-Qalanisi dan Ibn al-Adim, Sawutakin menjanjikan kekuasaan Damaskus kepada Duqaq. Duqaq meninggalkan Aleppo tanpa sepengetahuan Ridwan, sedangkan pasukan berkuda yang dikirim untuk mengejarnya gagal menyusul rombongannya. Setibanya di Damaskus, Duqaq diterima oleh Sawutakin dan memperoleh dukungan dari pasukan setempat . Ibn al-Athir menambahkan bahwa Yaghi-Siyan, penguasa Antiokhia, turut mendorong Duqaq untuk membangun pemerintahan mandiri di Damaskus, terpisah dari kekuasaan Ridwan. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam konflik kedua bersaudara tersebut. Ridwan menganggap Aleppo sebagai pusat kekuasaan yang hendak dipertahankannya, sedangkan Duqaq membangun pusat pemerintahan baru yang tidak tunduk kepada kakaknya. Dengan demikian, warisan Tutush terpecah menjadi dua kekuasaan regional yang memiliki kepentingan politik dan militer berbeda (Al-Athīr, 1987, juz 8: 503-04).

Kedudukan Duqaq di Damaskus kemudian diperkuat oleh kedatangan Tughtekin. Setelah dibebaskan dari tahanan oleh Barkiyaruq setelah tewasnya Tutush, Tughtekin kembali ke Damaskus pada 488 H. Duqaq menyambutnya dan memberikan tanggung jawab dalam urusan militer serta pemerintahan. Hubungan mereka semakin erat setelah Tughtekin menikahi Khatun Safwat al-Mulk, ibu Duqaq. Sementara itu, Sawutakin yang sebelumnya berperan mengundang Duqaq akhirnya disingkirkan dan dibunuh setelah muncul perselisihan di lingkungan pemerintahan. Pergantian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Duqaq membangun pemerintahan di Damaskus tidak dengan sendirinya membuatnya menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan. Sebaliknya, ketika Sawutakin tersingkir, Tughtekin memperoleh ruang lebih besar untuk mengendalikan

pemerintahan. Duqaq tetap menjadi penguasa secara formal, tetapi pelaksanaan kekuasaan semakin bergantung pada atabeg yang menguasai pasukan dan urusan pemerintahan (Al-Athīr, 1987, jil 9: 504). Menurut Pareto, ini adalah sirkulasi elite pada tingkat awal, yaitu Sawutakin digantikan Tughtekin. Tughtekin memadukan kekuatan (penguasaan militer) dan kecerdikan (pernikahan dengan ibu Duqaq) (Pareto, 1968: 50). Menurut Dahrendorf, otoritas yang sesungguhnya berpindah dari penguasa formal kepada pemegang kendali militer (Dahrendorf, 1957: 163-64).

Setelah terbentuknya dua pusat kekuasaan tersebut, Ridwan berusaha mengakhiri pemerintahan Duqaq dengan merebut Damaskus. Menurut Ibn al-Qalanisi, Ridwan memiliki keinginan kuat untuk menguasai kembali kota tersebut karena mengenalnya sejak masa sebelumnya. Pada 489 H/1096 M, ia bergerak menuju Damaskus dengan bantuan Sökmen bin Artuq. Ketika itu, Duqaq, Yaghi-Siyan, dan Ilghazi sedang berada di luar kota. Pertahanan Damaskus berada di tangan wazir Zayn al-Dawla Muhammad bin Abi al-Qasim, kepala keamanan Bakhtiyar, dan sejumlah tokoh setempat. Mereka mengatur pertahanan kota serta mencegah pasukan dan pemuda Damaskus melakukan serangan keluar yang tidak terkoordinasi. Pengepungan Ridwan tidak menghasilkan penaklukan. Serangannya terhenti setelah sebuah batu manjanik menewaskan seorang pejabat tinggi dari pihaknya, sehingga Ridwan akhirnya mundur ke Aleppo pada akhir Zulhijah 489 H, sekitar Desember 1096 M (Ibn al-Qalanisi, 1908: 130-32).

Ibn al-Adim memberikan gambaran lebih luas mengenai pergerakan pasukan Ridwan dan Sökmen dalam rangkaian upaya merebut Damaskus. Keduanya beberapa kali mengubah arah gerakan ketika mengetahui posisi Duqaq dan para pendukungnya. Dalam salah satu perkembangan, penahanan Ilghazi oleh Duqaq memengaruhi keputusan Ridwan dan Sökmen untuk mengubah rencana mereka. Ridwan kembali bergerak pada Ramadan tahun tersebut, tetapi usahanya juga tidak menghasilkan kemenangan yang dapat mengakhiri kekuasaan Duqaq (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 123-24). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa konflik tersebut bukan sekadar ancaman sesaat terhadap Damaskus. Ridwan berulang kali berusaha menundukkan kota itu, tetapi pertahanan Damaskus, dukungan para amir kepada Duqaq, dan keberadaan Tughtekin sebagai pengelola militer membuat upaya tersebut sulit berhasil. Kegagalan Ridwan mempertahankan tekanan militernya berarti bahwa pemerintahan Duqaq tetap bertahan sebagai kekuatan regional yang terpisah dari Aleppo. Dalam istilah Dahrendorf, konflik berlangsung dengan intensitas tinggi (kekerasan terbuka) tanpa menghasilkan kemenangan yang

menuntaskannya (Dahrendorf, 1957: 210-13). Dari sisi Pareto, Ridwan sebagai elite dinasti tidak mampu mengubah kekuatan militernya menjadi dominasi yang bertahan, sedangkan elite militer di sekitar Duqaq justru menentukan hasilnya (Pareto, 1968: 60-63).

Konflik Ridwan dan Duqaq juga berkembang melalui persaingan di antara para amir yang berada di sekitar keduanya. Di Aleppo, Yaghi-Siyan dan Yusuf bin Abq pernah berupaya menyingkirkan Janah al-Dawla agar dapat mengendalikan urusan Ridwan. Dalam ekspedisi ke Edessa, rencana tersebut mendorong Janah al-Dawla mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya. Ridwan kemudian memanggil Sökmen untuk memperkuat kedudukannya dalam menghadapi persaingan internal. Setelah pertempuran di Marj Dabiq, Ridwan memberikan Maarrat al-Numan kepada Sökmen, sedangkan Yusuf bin Abq kemudian dibunuh atas perintah Ridwan dan Janah al-Dawla melalui Barakat bin Faris al-Majjan (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 124).

Konfrontasi militer langsung antara pasukan Aleppo dan Damaskus mencapai titik penting pada 5 Rabiul akhir 490 H, sekitar Maret 1097 M, di kawasan Qinnasrin dan Sungai Quwayq. Menurut Ibn al-Adim, perundingan antara kedua pihak gagal mencapai kesepakatan sebelum pertempuran berlangsung. Ketegangan bahkan terlihat dalam pertukaran ejekan antara Yaghi-Siyan dan Sökmen. Yaghi-Siyan merendahkan Sökmen dengan menyebutnya sebagai penjual susu yang tidak pantas ikut campur dalam urusan tersebut, sedangkan Sökmen menyatakan bahwa ia akan membuktikan kemampuannya di medan perang. Pertempuran kemudian berakhir dengan kemenangan pihak Ridwan. Yaghi-Siyan melarikan diri ke Antiokhia, sedangkan Duqaq dan Tughtekin mundur ke Damaskus. Kemenangan ini memperkuat kedudukan Ridwan secara militer, tetapi tidak menghancurkan pemerintahan Duqaq. Damaskus tetap berada di bawah kekuasaan Duqaq, sehingga hasil pertempuran Qinnasrin tidak menghasilkan penyatuan kembali wilayah warisan Tutush (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 125-27).

Ibn al-Athir menyebutkan bahwa setelah kekalahan tersebut, kedua bersaudara mencapai kesepakatan mengenai penyebutan nama Ridwan dalam khutbah di Damaskus dan Antiokhia. Kesepakatan itu dapat dipahami sebagai upaya untuk meredakan persaingan terbuka setelah pihak Duqaq mengalami kekalahan. Namun, pengakuan melalui khutbah tidak serta-merta menghapus keberadaan pemerintahan Duqaq sebagai pusat kekuasaan tersendiri (Al-Athīr, 1987, jil 9: 11). Ridwan tetap memerintah Aleppo, sedangkan Duqaq mempertahankan Damaskus dengan dukungan para amirnya.

Kesepakatan khutbah ini merupakan contoh regulasi konflik menurut Dahrendorf: intensitas konflik diredam melalui pengakuan simbolik, tetapi pokok persoalan, yaitu pembagian otoritas, tidak terselesaikan (Dahrendorf, 1957: 164).

Kemenangan Ridwan juga tidak serta-merta memperkuat hubungannya dengan para pendukung sendiri. Setelah pertempuran Qinnasrin, hubungan Ridwan dengan Janah al-Dawla justru memburuk. Menurut Ibn al-Adim, Janah al-Dawla meninggalkan Aleppo pada malam hari dan menuju Homs. Ibn al-Qalanisi menempatkan peristiwa ini pada Syakban 490 H, sekitar Juli 1097 M, ketika Janah al-Dawla merasa keselamatannya terancam. Wakilnya, Qaraja, kemudian menyerahkan Homs kepadanya. Kepergian Janah al-Dawla merupakan perkembangan penting karena ia tidak lagi menjalankan perannya dari lingkungan pemerintahan Ridwan, tetapi kembali ke wilayah yang dapat menjadi basis kekuatan mandiri. Homs memberinya kedudukan teritorial, sehingga ia memiliki ruang untuk mempertahankan pasukan dan kepentingannya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Ridwan. Pada saat yang sama, Yaghi-Siyan kembali ke Aleppo dan mengambil peran penting dalam pengaturan militer serta urusan kota. Ridwan bahkan menikahi putri Yaghi-Siyan untuk memperkuat hubungan politiknya dengan penguasa Antiokhia (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 126-27).

Pada tahun yang sama, Ridwan juga berusaha mencari dukungan dari Dinasti Fatimiyah di Mesir. Ia sempat menyebut nama khalifah al-Musta'li dan wazir al-Afdal dalam khutbah selama beberapa Jumat dengan harapan memperoleh bantuan untuk merebut Damaskus. Langkah ini mendapat penentangan dari Sökmen dan Yaghi-Siyan, yang kemudian mendorong Ridwan mengembalikan khutbah kepada penyebutan sebelumnya. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa upaya Ridwan menundukkan Duqaq tidak hanya bergantung pada kekuatan pasukan Aleppo. Ia juga memerlukan dukungan dari kekuatan eksternal, tetapi upaya itu dibatasi oleh sikap para amir di sekelilingnya (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 129). Khutbah menjadi sarana untuk menyatakan afiliasi dan legitimasi politik, sementara reaksi para amir memperlihatkan bahwa orientasi politik penguasa tidak selalu dapat ditentukan secara sepihak.

Kehadiran Pasukan Salib di Syam sejak 1097 M menambah kompleksitas persaingan Ridwan dan Duqaq. Ancaman terhadap Antiokhia dan kota-kota di Syam utara seharusnya dapat mendorong para penguasa Muslim membangun kerja sama yang lebih kuat, tetapi rivalitas dinasti dan kepentingan regional tetap memengaruhi respons mereka. Menurut Ibn al-Adim, ketika Ridwan dan Yaghi-Siyan bergerak menuju Shayzar dan

mendengar bahwa pasukan Salib mendekati Antiokhia, Yaghi-Siyan ingin kembali untuk mempertahankan kotanya, sedangkan Sökmen mengusulkan agar mereka terlebih dahulu bergerak menuju Diyarbakr. Yaghi-Siyan meminta para Penguasa Muslim sekitarnya untuk membantunya mengirimkan bantuan terhadap Anthiokia untuk melawan pasukan Salib (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 128-29).

Menurut Ibn al-Athir dalam *al-Kamil fi al-Tarikh*, setelah Pasukan Salib menguasai Antiokhia pada 491 H/1098 M, Qawam al-Dawla Kerbogha menghimpun pasukan dari berbagai wilayah Syam dan bergerak menuju Antiokhia. Ia terlebih dahulu berkemah di Marj Dabiq, kemudian memperoleh dukungan dari sejumlah penguasa dan panglima Muslim, termasuk Duqaq bin Tutush, Tughtekin, Janah al-Dawla penguasa Homs, Arslan Tash penguasa Sinjar, serta Sulaiman bin Artuq. Pasukan yang berada di Aleppo tidak bergabung dalam penghimpunan tersebut. Koalisi tersebut juga menghadapi persoalan internal akibat sikap Kerbogha yang merendahkan para amir sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong sebagian dari mereka berniat meninggalkannya ketika pertempuran berlangsung. Ketika Pasukan Salib keluar dari Antiokhia untuk menghadapi pasukan Muslim, Kerbogha menolak saran untuk menyerang mereka secara bertahap sebelum seluruh pasukan berkumpul. Keputusan tersebut, disertai lemahnya solidaritas di antara para pemimpin, berujung pada kekalahan pasukan Muslim. Janah al-Dawla dan Syaqman bin Artuq termasuk di antara pihak yang terakhir melarikan diri (Al-Athīr, 1987, jil 9: 15-16). Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun para penguasa Syam dapat bekerja sama menghadapi ancaman Pasukan Salib, persaingan kepentingan dan lemahnya koordinasi antar-pemimpin tetap menjadi hambatan bagi terbentuknya kekuatan militer yang solid.

Setelah kekalahan di Antiokhia, persaingan politik di Syam tetap berlangsung di tengah meningkatnya tekanan Pasukan Salib. Pada 492 H/1099 M, ketika Maarrat al-Nu‘man dikepung Pasukan Salib, penduduknya meminta bantuan kepada Ridwan dan Janah al-Dawla, tetapi keduanya tidak memberikan pertolongan. Peristiwa ini memperlihatkan keterbatasan kerja sama antarpenguasa regional dalam menghadapi ancaman eksternal. Sementara itu, Janah al-Dawla tetap mempertahankan kekuasaannya di Homs setelah memisahkan diri dari lingkungan pemerintahan Ridwan. Kedudukannya sebagai penguasa wilayah memberinya basis militer dan politik tersendiri, meskipun ia masih terlibat dalam koalisi yang dibentuk untuk menghadapi Pasukan Salib (Ibn al-Adim t.t., juz. 2: 146).

Pada 495 H/1102 M, Janaḥ al-Dawla terbunuh di Homs oleh kelompok Bāṭiniyya. Ibn al-Qalanisi menyebut dalang peristiwa ini adalah al-Ḥakīm al-Munajjim, seorang penganut Baṭiniyyah dan pengikut Ridwan, penguasa Aleppo. Ia disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan ajaran tersebut di Aleppo dan Syam, dan ia mengutus tiga orang untuk membunuh Janaḥ al-Dawla di Homs (Ibn al-Qalanisi, 1908: 140-41). Menurut Farhad Daftary, menyebutkan bahwa sebagian besar sumber sepakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh al-Ḥakīm al-Munajjim untuk membunuh Janah berasal atas dorongan Ridwan, agar ia bisa menguasi Homs dan memperkuat posisinya dalam menghadapi Duqaq, Penguasa Damaskus (Daftary, 2007: 333).

Menurut Ibn Qalanisi, Peristiwa ini menimbulkan keguncangan di kalangan penduduk Homs. Keadaan menjadi kacau, dan sebagian besar penduduk Turki melarikan diri ke Damaskus. Situasi politik di kota itu semakin tidak stabil. Penduduk kemudian mengirim surat kepada Syams al-Muluk Duqaq di Damaskus, meminta agar ia mengirim seseorang untuk mengambil alih Homs serta melindungi kota tersebut sebelum berita kejadian itu sampai kepada pasukan Franka dan membangkitkan keinginan mereka untuk menguasainya. Duqaq bersama Zahiruddin Tughtekin, sang atabeg, kemudian berangkat dari Damaskus dengan membawa pasukan. Mereka tiba di Homs, mengambil alih kota tersebut, dan memasuki bentengnya (Ibn al-Qalanisi, 1908: 141).

Persaingan antara Ridwan dan Duqaq tetap berlangsung hingga wafatnya Duqaq pada Ramadan 497 H/1104 M. Menurut Ibn al-Adim, sebelum meninggal, Duqaq menyerahkan kekuasaan kepada putranya yang masih kecil, Tutush II, dan mempercayakan pemerintahan kepada Tughtekin sebagai atabeg. Keadaan ini memberikan kesempatan bagi Ridwan untuk kembali memperluas pengaruhnya ke Damaskus. Ia bergerak menuju kota tersebut dan melakukan pengepungan, kemudian memperoleh kesepakatan agar namanya disebut dalam khutbah dan dicantumkan pada mata uang. Namun, kesepakatan tersebut tidak menghasilkan penguasaan politik yang bertahan lama, sehingga Ridwan akhirnya kembali ke Aleppo (Ibn al-Adim t.t. 152-53). Kegagalan ini menunjukkan bahwa wafatnya Duqaq tidak otomatis menyatukan kembali wilayah peninggalan Tutush. Sebaliknya, pemerintahan Damaskus memasuki masa ketika keberlangsungan dinasti semakin bergantung pada peran atabeg yang mengendalikan urusan pemerintahan dan kekuatan militer. Kesepakatan khutbah dan mata uang kembali berfungsi sebagai regulasi konflik yang bersifat simbolik, bukan penyatuan otoritas.

Dalam perkembangan berikutnya, ia yang seharusnya merupakan atabeg Duqaq II. Alih-alih menjadikan Duqaq sebagai penguasa Damaskus, Tughtekin kemudian mengangkat Irtash, saudara Duqaq, sebagai penguasa Damaskus pada September 1104 M. Ketika Irtash meninggalkan Damaskus dan Tutush II kemudian wafat, Tughtekin mulai membangun kekuasaan mandiri yang dikenal sebagai Dinasti Burids. Perubahan ini menunjukkan pergeseran struktur kekuasaan Seljuk di Syam dimana persaingan yang sebelumnya berpusat pada Ridwan dan Duqaq sebagai putra-putra Tutush berkembang menjadi penguatan otoritas tokoh militer yang semula berperan sebagai pendamping penguasa dinasti (Küçüksipahioğlu, 2024: 101).

Dampak Fragmentasi Kekuasaan Seljuk terhadap Stabilitas Politik dan Pergeseran Elite di Syam

Fragmentasi kekuasaan Seljuk di Syam pada akhir abad ke-11 tidak hanya menimbulkan persaingan antara Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus, tetapi juga membentuk kondisi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut pada awal abad ke-12. Berikut merupakan dampak fragmentasi kekuasaan Seljuk terhadap stabilitas politik dan pergeseran elite di Syam.

1. Melemahnya Koordinasi Politik dan Pertahanan Wilayah Syam

   Salah satu dampak jangka panjang fragmentasi kekuasaan Seljuk adalah melemahnya koordinasi politik dan pertahanan di wilayah Syam. Pada masa Ridwan dan Duqaq, Aleppo dan Damaskus berkembang sebagai dua pusat kekuasaan yang memiliki kepentingan masing-masing. Perbedaan kepentingan tersebut membuat hubungan antara kedua penguasa tidak selalu dapat diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar. Meskipun keduanya berasal dari keluarga yang sama, kesamaan dinasti tidak dengan sendirinya melahirkan kesatuan kebijakan politik maupun militer. Persaingan dalam mempertahankan wilayah dan pengaruh justru membuat sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bersama terserap ke dalam konflik internal (Wilson, 2023: 123).

   Kondisi ini menjadi semakin penting ketika Pasukan Salib memasuki Syam dan mulai membangun kekuasaan di wilayah pesisir serta pedalaman. Keberhasilan

mereka tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer sendiri, tetapi juga oleh keadaan politik setempat yang terdiri atas berbagai penguasa dengan kepentingan berbeda. Dalam situasi seperti itu, setiap penguasa harus mempertimbangkan ancaman terhadap wilayahnya, hubungan dengan penguasa Muslim lainnya, dan kemungkinan hilangnya kekuasaan apabila mengerahkan pasukan terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Akibatnya, respons terhadap ancaman Pasukan Salib tidak selalu berlangsung secara serentak dan terkoordinasi. Pengepungan dan jatuhnya Tripoli pada 1109 M dan jatuhnya Tyre pada 1124 M, memperlihatkan perluasan kekuasaan Pasukan Salib di kawasan pesisir Syam. Peristiwa-peristiwa tersebut perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, sebab fragmentasi politik Muslim bukanlah satu-satunya faktor yang menjelaskan keberhasilan Pasukan Salib (Hillenbrand, 1999: 20-21 dan 79-80). Kekuatan pertahanan kota, ketersediaan pasukan, kondisi geografis, strategi pengepungan, dan dukungan dari wilayah lain juga berpengaruh. Meskipun demikian, tidak adanya kesatuan politik yang stabil di antara para penguasa Muslim menjadi salah satu persoalan yang menyulitkan pembentukan strategi pertahanan regional yang berkesinambungan.

2. Transformasi Kekuasaan Atabeg dan Munculnya Elite Regional

Perkembangan politik Damaskus memperlihatkan perubahan yang berbeda dari Aleppo. Di kota ini, Tughtekin yang semula berperan sebagai atabeg Duqaq secara bertahap menjadi tokoh utama dalam pemerintahan. Kedudukannya tidak hanya bertumpu pada hubungan dengan keluarga penguasa Seljuk, tetapi juga pada pengaruh militer dan kemampuannya mempertahankan kendali atas pusat pemerintahan. Wafatnya Duqaq pada 1104 M menjadi titik penting karena membuka persoalan suksesi di Damaskus (Gök, 2016: 247). Keadaan ini memberikan kesempatan bagi Tughtekin untuk memperkuat kedudukannya di tengah lemahnya posisi penerus dinasti.

Jabatan atabeg pada mulanya berkaitan dengan tanggung jawab mendampingi dan mendidik seorang pangeran, sekaligus membantu menjalankan urusan pemerintahan. Namun, dalam praktik politik Seljuk, kedudukan tersebut dapat memberikan akses terhadap kekuasaan militer, administrasi, dan jaringan elite. Ketika penguasa yang didampingi wafat atau belum mampu mengendalikan pemerintahan secara mandiri, seorang atabeg berpeluang mengambil alih kendali politik. Perkembangan ini terlihat pada Tughtekin di Damaskus. Setelah Tutush

wafat dan wilayah kekuasaannya terbagi di antara putra-putranya, Duqaq memperoleh Damaskus dengan menyerahkan urusan pemerintahannya kepada Tughtekin. Ketika Duqaq wafat pada 1104 M, Tughtekin tampil sebagai penguasa de facto Damaskus. Ia kemudian mempertahankan otonomi politiknya di tengah persaingan dengan Dinasti Fatimiyah, pasukan Salib, serta kekuatan Seljuk di Syam dan Irak. Di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Damaskus berkembang menjadi pemerintahan yang relatif mandiri dan diteruskan oleh keturunannya sebagai Dinasti Burid. Tughtekin wafat pada 1128 M dan digantikan oleh putranya, Taj al-Muluk Buri (Meri, 2006: 128).

Perkembangan serupa terlihat pada Imaduddin Zanki, meskipun jalur politik dan wilayah kekuasaannya tidak sepenuhnya sama dengan Tughtekin. Zanki merupakan putra Aq Sunqur al-Hajib, seorang gubernur Aleppo pada masa Sultan Maliksyah yang tewas dalam konflik dengan Tutush pada 1094 M (Nursyamsi, 2023: 54). Hubungan tersebut menghubungkan dinamika politik akhir abad ke-11 dengan kemunculan kekuatan baru pada abad ke-12. Namun, Zanki tidak tepat disebut sebagai penerus langsung pemerintahan ayahnya di Aleppo, sebab ia membangun karier politiknya melalui lingkungan kekuasaan Seljuk yang lebih luas sebelum tampil sebagai penguasa regional.

Zanki memperoleh kedudukan penting di Mosul pada 1127 M dan menguasai Aleppo pada 1128 M. Dengan menguasai dua pusat strategis tersebut, ia membangun kekuatan yang melampaui satu kota dan mampu memengaruhi keseimbangan politik di Syam serta Jazirah (Wilson, 2023: 198-99). Pada 1144 M, pasukannya merebut Edessa dari Pasukan Salib. Penaklukan ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu keberhasilan besar kekuatan Muslim dalam menghadapi negara-negara Salib pada awal abad ke-12 (Abdullah, 2016: 29-30). Peristiwa tersebut juga memperlihatkan bahwa munculnya penguasa regional yang memiliki kapasitas militer dan politik lebih besar dapat mengubah pola hubungan kekuasaan di kawasan itu.

KESIMPULAN

Fragmentasi kekuasaan Seljuk di Syam setelah wafatnya Tutush pada 1095 M merupakan konsekuensi dari lemahnya sistem suksesi dinasti dan persaingan kepentingan

di antara para pewaris kekuasaan. Kondisi politik pada masa Tutush memperlihatkan bahwa pembagian wilayah kepada anggota keluarga dinasti memang memberikan basis kekuasaan regional, tetapi juga membuka peluang persaingan ketika otoritas pusat melemah. Wafatnya Tutush kemudian memicu konflik antara Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus yang menyebabkan wilayah kekuasaannya terpecah dan menghambat konsolidasi politik di Syam. Dinamika konflik pada 1095–1104 M menunjukkan bahwa persaingan kedua bersaudara tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk konfrontasi militer, tetapi juga melibatkan manuver diplomatik, persaingan antaramir, dan perebutan pengaruh di lingkungan pemerintahan. Dalam situasi tersebut, Janah al-Dawla memperkuat kekuasaannya di Homs, sedangkan Tughtekin secara bertahap mengambil alih kendali pemerintahan Damaskus setelah wafatnya Duqaq pada 1104 M. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa para atabeg tidak lagi sekadar menjalankan tugas mendampingi penguasa dinasti, tetapi mampu membangun kekuasaan mandiri melalui penguasaan militer dan administrasi. Fragmentasi tersebut turut melemahkan koordinasi politik dan pertahanan antarpenguasa Muslim ketika menghadapi ekspansi Pasukan Salib, meskipun keberhasilan Pasukan Salib juga dipengaruhi faktor militer dan strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2016). Peranan Nuruddin Zanki sebagai amir Dinasti Abbasiyah dan perjuangannya melawan Tentara Salib (1148–1174 M). *Tamaddun,* 4(2), 23–48. https://doi.org/10.24235/tamaddun.v1i2.1177

Abdurahman, D. (2011). Metodologi penelitian sejarah Islam. Penerbit Ombak.

Al-Athīr, I. (1987). *Al-Kāmil fī al-tārīkh* (Vol. 8, M. Y. Al-Daqqāq, tahqiq). Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Athīr, I. (1987). *Al-Kāmil fī al-tārīkh* (Vol. 9, M. Y. Al-Daqqāq, tahqiq). Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Zanki, J. M. H. A. (1990). *The emirate of Damascus in the early crusading period, 488–549/1095–1154* [Disertasi doktoral, University of St Andrews].

Bosworth, C. E. (1968). *The Iranian world (A.D. 1000–1217)*. In J. A. Boyle (Ed.), The Cambridge history of Iran: Vol. 5. The Saljuq and Mongol periods (pp. 1–202). Cambridge University Press.

Bosworth, C. E. (1988). Barkīāroq. Encyclopaedia Iranica, 3(8), 800–801. London dan New York: Routledge & Kegan Paul. https://www.iranicaonline.org/articles/barkiaroq-rokn-al-din-abul-mozaffar-b/

Daftary, F. (2007). *The Ismāʿīlīs: Their history and doctrines* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Dahrendorf, R. (1957). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.

Duman, İ. (2016). Dımaşk Selçuklu meliki Ertaş bin Tutuş. *Türkiyat Mecmuası*, 26(1), 107–115.
Gök, İ. (2016). Türklerin Suriye'ye girişi ve Süleymanşâh. *Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 1(31), 217–250. https://doi.org/10.21563/sutad.187080
Hillenbrand, C. (1999). The Crusades: Islamic perspectives. Edinburgh University Press.
Ibn al-Adim, U. ibn A. ibn H. Allah. (t.t.). *Zubdat al-Halab min Tarikh Halab* (S. al-Dahhan, tahqiq). Institut Français de Damas.
Ibn al-Qalanisi, A. Y. H. ibn A. (1908). *Tarikh Abi Ya'la Hamzah ibn al-Qalanisi: Al-ma'ruf bi-Dhayl Tarikh Dimashq* (H. F. Amedroz, tahqiq). Matba'at al-Aba' al-Yasu'iyyin.
Küçüksipahioğlu, B. (2024). Tughtigin, ruler of Damascus: Struggle with the Crusaders, war, and alliance. *Şarkiyat Mecmuası*, (45), 95–116. https://doi.org/10.26650/jos.1522758
Manan, N. A. (2018). Dinasti Saljuk dalam sejarah peradaban Islam. *Adabiya*, 20(2), 13–20. https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i2.7432
Meri, J. W. (Ed.). (2006). *Medieval Islamic civilization: An encyclopedia* (Vol. 1). Routledge.
Nursyamsi. (2023). *Kepemimpinan dan kontribusi Nuruddin Zanki pada Perang Salib (1145–1174 M): Suatu tinjauan historis* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].
Pareto, V. (1968). *The rise and fall of the elites*. Bedminster Press.
Shobari, A. I. (2008). *Perang Salib pertama 488–539 H/1095–1144 M: Deskripsi ekspansi Tentara Salib dan respons umat Islam* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
Wilson, J. (2023). *Medieval Syria and the onset of the Crusades: The political world of Bilad al-Sham*, 1050–1128. Edinburgh University Press.